

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alo Lilweri, *Memahami Peran Komunikasi Masaa Dalam Masyarakat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Bakri Abbas, *Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahannya*, Jakarta, Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Dwipayana AAGN Ari, dkk, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, skripsi , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.II., Alumni, Bandung, 1986.
- Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi*,Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indoneisa, Jakarta, 1986.

- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Edisi I, Cet.8., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet.II., Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, 2003.
- Syakhroza, Akhmad, *Corporate Governance : Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya Pada Perusahaan Bumn*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta 2005.
- Wahidin dkk, *Filter Komunikasi Media Elektronik*, Pusat Belajar, Yogyakarta, 2006.
- Zulkarimein Nasution, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Jakarta, Universitas Terbuka, 1993.
- Zokismael, *Globalisasi dan Neoliberalisme : Pengaruh dan Dampaknya Bagi Demokratisasi Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009.

SUMBER LAIN

a. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke- 4.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan KPI.

b. Jurnal

Devi Rahayu, Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), UU Tentang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Tim Interaksa, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Karisma, Jakarta, 2006.

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

c. Internet

Endra Yudha, *Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <http://feelinbali.blogspot.co.id/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>, diunduh pada Rabu 30 Maret 2016, pukul 10.50 Wib.

<http://kpid-jatimprov.go.id/app/web/index-detail.php>.

<http://www.parlemenjatim.com/komisi/komisi-a/766-komisi-a-minta-panitia-seleksi-kpid-jatim-dibubarkan>

<https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>

<http://www.damang.web.id/2012/11/teori-kewenangan.html>

<http://www.kompasiana.com/navarone/tumpang-tindih-kewenangan-penyelenggaraan-negara-ditinjau-dalam-aspek-ketertiban-administrasi-negara-bagian-2-kasus-kewenangan-penetapan->

kebijakan-di-bidang-kearsipan-antara-bpk-dengan-arsip-nasional-republik-indonesia_552fffd46ea8348b038b4585

d. Wawancara

Irianto Edi Pramono, Komisioner Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)